

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM
RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI DINAS
SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI**

SKRIPSI

OLEH :

SITI AISYAH

1403100009

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Konsentrasi Pembangunan



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama : SITI AISYAH

NPM : 1403100009

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI

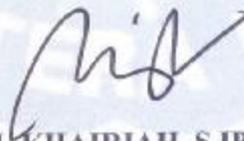
Medan, 29 Maret 2018

PEMBIMBING



Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd

Plt DEKAN



Dr. RULANTO, M.Si

BERITA ACARA PENGESAHAN

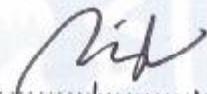
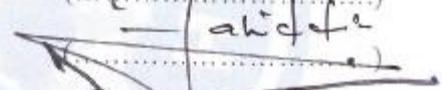
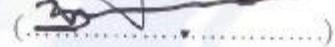
Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : SITI AISYAH
NPM : 1403100009
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 29 Maret 2018
Waktu : 08.00 s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd
PENGUJI II : MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP
PENGUJI III : Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si


(.....)

(.....)

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua,


Dr. E. DIANTO, M.Si



Sekretaris,


Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Siti Aisyah NPM 1403100009, menyatakan sesungguhnya:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk apapun yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan, atau menjiplak karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa didalam skripsi ini adalah karya dan tulisan sendiri, bukan karya orang lain atau kerja plagiat, jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan disepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Maret 2018



SITI AISYAH



Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Beribadahlah dengan Iman dan Takwa
 dan surai ini agar disebutkan
 namanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6813450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SITI AISYAH
 NPM : 1403100009
 Jurusan : IAN (PEMBANGUNAN)
 Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BER-SAMA (KUBS) DALAM LANGKAH PEMBERDAYAAN URMEM PIDINASSOSIAL KOTA TADULING RALAN

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	27/02/2010	BIMBINGAN DRAF WAWAN CARA	↓
2.	01/03/2010	BIMBINGAN BAB IV	↓
3.	06/03/2010	PENAMBAHAN HASIL WAWANCARA & PERBAIKAN PENULISAN	↓
4.	09/03/2010	PERBAIKAN ABSTRACT	↓
5.	12/03/2010	PENAMBAHAN PEMBAHASAN BAB IV	↓
6.	16/03/2010	PENAMBAHAN KESIMPULAN & SARAN	↓
7.	20/03/2010	PERBAIKAN BAB V	↓
8.	23/03/2010	ACC SKRIPSI	↓

Medan, MARET 20..10

Dekan,

DOR ADHANI, S.Sos, M. Kom

Ketua Program Studi,

(NAUL F.H.I, KAH, S.P. M. POL

Pembimbing ke :

(MOHD Yusel, D. M. S)

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN UMKM DI DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI

SITI AISYAH

1403100009

Pemberdayaan UMKM dalam program KUBE (kelompok usaha bersama) dapat dilihat dari tujuan yang akan dicapai KUBE mempunyai tujuan yaitu peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok, peningkatan pendapatan, pengembangan usaha, dan peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dengan masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya mengalami beberapa masalah seperti: terputusnya bantuan dana, kurangnya sarana dan prasarana transportasi, dan sebagainya.

Objek dalam penelitian ini adalah KUBE. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program KUBE dalam rangka pemberdayaan UMKM di Dinas Sosial kota Tanjungbalai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dipilih dengan teknik *puposive sampling*.

Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa permasalahan yang dihadapi dalam KUBE yaitu minimnya sarana dan prasarana, kurangnya dana serta adanya campur tangan dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Upaya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi yaitu dengan melakukan musyawarah. Dalam dimensi pencapaian tujuan, KUBE belum mencapai tujuan yang ditetapkan.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya peningkatan dalam pengawasan pemerintah terhadap program KUBE agar berjalan lebih efektif sesuai dengan yang ditetapkan sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik. Perlunya saling keterbukaan satu sama lain antara ketua-ketua kelompok dan pemerintah agar lebih terjalin kerjasamanya sehingga dapat membantu satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Adanya kerja sama yang baik dari pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap dana untuk KUBE supaya tidak terjadi penyalahgunaan dana sehingga dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan program KUBE agar lebih efektif.

Kata kunci: efektivitas, program, pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana pendidikan S-1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis memilih Skripsi ini berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai”. Di dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada nama-nama yang tersebut di bawah ini.

1. Terimakasih dan yang paling utama, kepada Ayahanda Alm Awaluddin, Ibunda tercinta Salbiah Br Mangunsong, dan kakak-kakak ku serta adik-adikku tersayang yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.

2. Terima kasih terspesial untuk teman hidup saya RIDWANSYAH MARPAUNG sampai sekarang ini Insya Allah sampai niat baik kita berdua terlaksana amin yang sudah banyak membantu terutama membantu keluarga saya.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mohd Yusri., M. Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan kesempatan kepada penulis selama penyusunan skripsi
7. Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Seluruh pegawai dan keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan dukungan dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini.

9. Bapak M. Idris, SH selaku Kepala Dinas Sosial di kota Tanjungbalai yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Sosial.
10. Seluruh pegawai dan staf Kantor Dinas Sosial kota Tanjungbalai yang telah memberi semangat kepada penulis.
11. Terkhusus buat teman seperjuangan Rohani, Tri Ara Putri, Sury Septi Pratiwi, Evi mandasari dan Lia Lestari yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya anak Konsentrasi Pembangunan kelas IAN A Sore dan seluruh teman-teman Mahasiswa/i Ilmu Administrasi Negara semoga kita semua sukses.
13. Terimakasih kepada teman-teman kost Putri Wandu yang telah banyak membantu dan memberi semangat penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya.
Amin.

Medan, 29 Maret 2018

SITI AISYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Efektivitas	8
B. Indikator dalam Pengukuran Efektivitas	9
C. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	11
D. Pengertian Program.....	12
E. Pengertian Program KUBE	12
F. Tujuan Program KUBE.....	14
G. Sasaran Program KUBE.....	15

H. Pelaksanaan Program KUBE.....	17
I. Pengertian Pemberdayaan	19
J. Pengertian Pemberdayaan UMKM	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	24
B. Kerangka Konsep.....	24
C. Definisi Konsep	25
D. Kategorisasi	26
E. Informan	27
F. Teknik pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
I. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
J. Visi dan Misi Dinas Sosial	30
K. TUPOKSI Perangkat Desa	33
L. Struktur Organisasi Pemerintahan Dinas Sosial	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data	52
B. Hasil Penelitian.....	53
C. Pembahasan	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
--------------------	----

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep	25
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Baja Dolok.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Kategorisasi	26

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran IV : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran VIII : Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa dari Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Lampiran IX : Surat Keterangan Selesai Melakukan Penelitian dari Kantor Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.
- Lampiran X : SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
- Lampiran XI : SK-7 Surat Pernyataan
- Lampiran XII : SK-10 Undangan Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat. Pemerintah telah memberlakukan UU No. 20 tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada 4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung hukum untuk memberdayakan UMKM. Maksudnya, pemberlakuan undang-undang tersebut memberikan implikasi untuk menjadikannya sebagai pedoman bersama kearah perubahan paradigma pemberdayaan UMKM.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam UU tersebut didefinisikan bahwa pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri.

Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu alternatif yang dipilih pemerintah kota Tanjungbalai dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah masing-masing.

Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu daerah.

Untuk memberdayakan UMKM diperlukan peranan pemerintah daerah, peranan pemerintah daerah disini adalah memutuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha dan pelaku usaha itu sendiri memiliki peranan pokok bagi perkembangan UMKM karena pelaku usaha memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan UMKM.

Menurut Tulus T. H. Tambunan (2009: 75), ada beberapa kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam pengembangan UMKM yaitu: “Keterbatasan modal usaha, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan kesulitan pemasaran”. Maka perlunya pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Pembinaan dan pendampingan masyarakat ini terkait dengan bagaimana cara mengelola dana usaha tersebut dengan baik, memberikan keterampilan untuk memunculkan ide-ide yang baru dalam membuka usaha dan sebagainya agar permasalahan yang sering dihadapi dapat teratasi.

Pemerintah Kota Tanjungbalai membuat suatu program yang dimana pentingnya untuk pemberdayaan masyarakat dan membentuk masyarakat dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dengan diadakannya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membentuk suatu usaha.

KUBE adalah Kelompok Usaha Bersama yaitu salah satu program pemerintah yang ada pada Kementerian Sosial RI khususnya di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan

untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha melalui program Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Pemerintah kota Tanjungbalai berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan penyediaan berbagai kesempatan berusaha di bidang UMKM. Namun usaha tersebut terkendala, adapun serangkaian masalah yang dihadapi, seperti :

1. Modal Terbatas;

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Pada umumnya UMKM merupakan suatu usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh, karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank sulit untuk dipenuhi.

2. Sumber Daya Manusia yang kurang memadai

Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun-temurun. Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan SDM-nya, unit usaha tersebut sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya.

3. Pemasaran yang relatif sulit.

Usaha kecil yang pada umumnya usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan, yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik.

Diharapkan pada struktur pasar yang sangat kompetitif, bukan saja antara industri kecil melainkan ada kalanya juga dengan industri besar. Disamping itu, kesulitan pemasaran juga disebabkan oleh berbagai faktor pendukung utama seperti informasi mengenai perubahan dan peluang pasar yang ada di dalam maupun di luar negeri.

Anggota juga menyebutkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh KUBE adalah pada aspek social yang meliputi kurangnya kerjasama antar anggota kelompok, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah dalam kelompok, dan tingkat partisipasi anggota yang masih rendah.

Melihat kendala-kendala di atas, maka Dinas Sosial Kota Tanjungbalai perlu melakukan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan melalui salah satu program pemerintah yaitu KUBE. Dinas Sosial Kota Tanjungbalai adalah unsur pelaksanaan Pemerintah kota yang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pengusaha kecil dan menengah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Dengan demikian pengembangan terhadap pelaksanaan Program

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sudah menjadi tugas pokok dalam program kerja Dinas Sosial.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai?”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM Di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

- a) Penelitian ini dapat memberikan referensi pemikiran yang positif dan membangun bagi pemecahan masalah praktis yang berkaitan dengan judul penelitian.

- b) Mengembangkan wawasan keilmuan dan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah.
- c) Untuk pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara serta sebagai bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada Bab ini berisikan dan menguraikan teori tentang konsep efektivitas, Konsep Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan konsep Pembedayaan UMKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kategorisasi, kerangka konsep, teknik penentuan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini membuat tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber

BAB V : PENUTUP

Pada Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diteliti.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Efektivitas

Menurut Mathis dan Jackson (2001:106), efektivitas didefinisikan sebagai merancang dan mengimplementasikan sekelompok kebijakan dan praktik dan menjamin kesuksesan bahwa sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan. Efektivitas memiliki empat sifat utama bagi organisasi, antara lain: (a) berorientasi pada kondisi ekonomi secara menyeluruh dan bersifat umum untuk daerah tertentu; (b) menjamin terhadap perkembangan industri dan pertumbuhan sehingga dapat melahirkan suatu pola tertentu dalam kenyataan; (c) menentukan tindakan tertentu bagi pemerintah dalam menjalankan program; (d) mengikutsertakan masyarakat sehingga masyarakat merasa dirinya memiliki kepentingan.

Menurut Gie (2007:2), efektivitas adalah terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki. Jadi, perbuatan seseorang efektif adalah perbuatan yang menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki oleh orang itu. Setiap pekerjaan yang efisien tentu berarti juga efektif, karena dilihat dari segi usaha hasil yang dikehendaki telah tercapai dan bahkan dengan penggunaan unsur minimal.

Menurut Siagian (2002:20), menyatakan pengertian efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu pada waktunya. Selanjutnya dikemukakan bahwa efektivitas sebagai orientasi kerja menyoroti empat hal yaitu: (a) Sumber daya, dana, sarana

dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan dibatasi; (b) jumlah dan mutu barang atau jasa yang harus ditentukan sudah dihasilkan; (c) batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah ditetapkan; (d) tata cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu kegiatan atau pelaksanaan tugas, fungsi dari pada suatu organisasi atau sejenisnya dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.

B. Ukuran Efektivitas

Menurut Sumaryadi (2005:105), ukuran efektivitas yang univariasi yaitu: “Kualitas, produktivitas, kesiagaan, laba atau penghasilan, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, perputaran atau keluar masuknya perkerjaan, kemangkiran, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepuasan, penerimaan tujuan-organisasi, kepaduan, konflik-konflik kelompok, keluwesan-adaptasi, penilaian oleh pihak luar”.

Menurut Campbell (1989:121), ada beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: (a) Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; (b) Produktivitas artinya kualitas dari jasa yang dihasilkan; (c) Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; (d) Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi; (e) Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; (f) Pemanfaatan lingkungan yaitu

batas keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya, memperoleh dengan sumber daya yang langka dan yang berharga diperlukannya untuk operasi yang efektif; (g) Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; (h) Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; (i) Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan; (j) Kepuasan yaitu adanya tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas pekerjaannya dalam organisasi; (k) Kepaduan yaitu fakta para bahwa anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; (l) Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan.

Sehubungan dengan hal yang dikemukakan diatas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, terdapat indikator ukuran efektivitas program sebagai suatu sistem yang menunjukkan tingkat sejauh mana organisasi melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal berdasarkan paa indikator yaitu: (a) Kejelasan dan efektivitas tujuan program; (b) Kejelasan strategi pencapaian; (c) Perumusan kebijakan program yang mantap; (d) Penyusunan program yang tepat; (e) Penyediaan sarana dan prasaran; (f) Efektivitas operasional dan fungsional program; (g) Efektivitas sasaran program; (h) Efektivitas individu dan unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan. Disamping itu adanya evaluasi apabila terjadi

kesalah pengertian pada tingkat produktivitas yang dicapai, sehingga akan tercapai suatu kesinambungan (sustainability).

Menurut Streers (1985:53) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, yaitu: (1) Pencapaian Tujuan; (2)Integrasi; (3)Adaptasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran efektivitas merupakan penilaian dalam artinya tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia.

Dengan teori ini diharapkan dapat mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Tanjungbalai yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan/mengembangkan usaha masyarakat terutama para anggota KUBE melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meningkatkan perekonomian/pendapatan masyarakat miskin, serta meningkatkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitarnya.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Sutrisno (2011:125), ada empat kelompok variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas, yaitu: (a) Karakteristik organisasi termasuk struktur dan organisasi; (b) Karakteristik lingkungan intern dan lingkungan ekstern; (c) Karakteristik karyawan; (d) Kebijakan praktik manajemen.

D. Pengertian Program

Menurut Herman dalam Tayibnapi (2008:9) berpendapat bahwa “Program ialah segala sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.”

Menurut Umar (2002:15), menyatakan bahwa “Program merupakan rencana kerja yang dilaksanakan dari kebijakan yang telah diambil atau ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain dikatakan bahwa program itu merupakan rencana kerja. Sedangkan menurut Hasibuan (2001:100) menyatakan bahwa “Program adalah suatu rencana konkrit karena dalam program sudah tercantum, baik itu sasaran, kebijakan, prosedur, waktu maupun anggarannya. Jadi program juga merupakan usaha-usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidang masing-masing”.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa program adalah suatu susunan rencana yang dibuat untuk dijalankan dalam suatu kegiatan agar tercapai tujuan yang diharapkan.

E. Pengertian Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Dalam rangka membantu percepatan pengentasan kemiskinan, Departement Sosial meluncurkan Program KUBE dan dirancang sesuai dengan potensi masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin untuk lebih maju secara ekonomi dan sosial, meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat diartikan sebagai sebuah kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai tujuan untuk belajar berusaha melalui kegiatan tertentu. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/Pb/2005 Tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan UMKM Melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), menyebutkan :

“Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan Anggotanya, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama”.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok warga masyarakat yang

saling berinteraksi dan mempunyai kebersamaan melakukan kegiatan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidupnya.

KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dan keseluruhan proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) dalam rangka memantapkan program menghapuskan kemiskinan (MPMK). KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur baku proses Program Kesejahteraan Sosial (PROKESOS) kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan ketrampilan berusaha, bantuan stimulus dan pendampingan.

F. Tujuan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Pada dasarnya tujuan keberadaan Kelompok Usaha Bersama dimasyarakat adalah terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat tersebut. Pemahaman tentang mutu hidup masyarakat akan berbeda dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lain. Dengan demikian rumusan tujuan menjadi tolak ukur dari kegiatan yang dilakukan.

Tujuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah untuk meningkatkan motivasi, interaksi dan kerjasama dalam kelompok, mendayagunakan potensi dan sumber daya ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.

Tujuan KUBE diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan kemampuan berusaha pada anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
2. Peningkatan pendapatan.
3. Pengembangan usaha.
4. Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan masyarakat sekitar.

Dapat disimpulkan, bahwa tujuan dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu meningkatkan motivasi dan kerjasama dalam kelompok, menghapus kemiskinan, meningkatkan kemampuan anggota dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan memberi jalan kepada anggota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi baik didalam keluarga maupun lingkungannya.

G. Sasaran Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Sasaran program KUBE adalah warga masyarakat sebagai anggota kelompok yang diikutkan (keluarga fakir miskin dan keluarga miskin) yang memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Perlu dipikirkan siapa yang sesungguhnya menjadi sasaran dari Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Kriteria sasaran (peserta didik) dalam program Kelompok Usaha Bersama yaitu :

1. Warga masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan atau pengangguran.
2. Warga masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah, seperti tidak tamat sekolah dasar dan tidak tamat SLTP, dan warga masyarakat

yang belum pernah mengenyam pendidikan sehingga tidak mempunyai keterampilan.

3. Penduduk usia produktif (18-35 tahun).
4. Mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
5. Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program kursus kewirausahaan kota.
6. Diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.

Untuk itu sasaran program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini diperuntukkan bagi warga masyarakat yang usia produktif dan program ini bagi mereka yang tidak mampu agar dalam pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut mendapatkan hasil yang maksimal bagi kehidupan warga masyarakat yang mengikuti program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sebagai salah satu program untuk memberdayakan dan mendorong masyarakat untuk mandiri, Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada selama ini dapat berkembang menjadi usaha ekonomi produktif yang dapat memberikan profit sehingga KUBE tersebut tidak saja memberikan manfaat bagi warga masyarakat lainnya. Untuk dapat berkembang menjadi usaha ekonomi produktif yang menguntungkan, KUBE sangat tergantung pada manajemennya. Dengan pengelolaan secara bersama-sama bukan tidak mungkin KUBE akan berkembang menjadi sebuah bidang usaha yang menguntungkan. Oleh karena KUBE merupakan wadah yang dibentuk dari oleh dan untuk keluarga binaan sosial sendiri, maka kepengurusannya juga dikerjakan oleh para anggotanya sendiri sekaligus melaksanakannya. Dalam pembentukn KUBE ada beberapa hal

yang perlu diperhatikan, yaitu :Lokasi tempat tinggal keluarga binaan sosial (KBS) berdekatan sehingga memungkinkan mereka melakukan kegiatan secara teratur.

1. Kesamaan jenis usaha ekonomis produktif.
2. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku.
3. Kemudahan dalam pemasaran.
4. Kemudahan dalam pembinaan.
5. Pengelolaan jenis usaha 5-10 orang.
6. KUBE dikelola oleh anggota kelompok sendiri dibawah bimbingan seorang pembina atau pendamping, pelaksanaan KUBE harus melibatkan semua anggota kelompok.
7. Pembina atau pendamping bersama-sama anggota kelompok berusaha agar KUBE tersebut dapat lebih ditingkatkan dan dikembangkan pada waktu mendatang.
8. Aparat desa/kecamatan agar memberikan petunjuk, bimbingan dan mengikuti pelaksanaan KUBE serta membantu memecahkan kesulitan yang dihadapi anggota KUBE dimasyarakat.
9. Perlu dibuat aturan main dalam kelompok yang mengatur tentang hak dan kewajiban serta sanksi bagi anggota kelompok.

H. Pelaksanaan Program KUBE

Kegiatan pemberdayaan fakir miskin melalui BLPS (Bantuan langsung pemberdayaan sosial) ini dilaksanakan dalam upaya penguatan kembali

kemampuan KUBE dalam mengelola dana stimulan UEP. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini sebagai berikut :

1. Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan

Penjelasan lokasi dan pemetaan kebutuhan ke kabupaten/kota bertujuan untuk melakukan verifikasi langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran tentang usulan-usulan proposal yang telah direkomendasikan Dinas Sosial Provinsi. Dalam kesempatan ini dilakukan juga kunjungann langsung kelokasi KUBE untuk mengetahui gambaran kegiatan pengelolaan aktivitas UEP. Hasil penjajakan dan pemetaan kebutuhan ini sebagai upaya memastikan bahwa usulan program layak untuk dilakukan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Sosialisasi

Sosialisasi program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pelaksanaan P2FM BLPS dan membangun kesamaan persepsi terhadap proses dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan, melalui sosialisasi ini dapat juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang terkait serta mendapatkan umpan balik terhadap rncana kegiatan.

3. Penyerahan Bantuan

Setelah semua data dan persyaratan KUBE, pendamping sudah lengkap (penetapan KUBE, rekening), maka dilanjutkan penyaluran dana stimulan UEP kepada KUBE melalui transfer ke masing-masing rekening. Penyaluran bantuan dan bersifat hibah bersyarat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Bantuan langsung pemberdayaan sosial

(BLPS) adalah dana stimulan UEP (usaha ekonomi produktif) yang disalurkan secara langsung kepada KUBE melalui rekening.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan agar proses pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

I. Pengertian Pemberdayaan

Menurut Suhendra (2006:74-75), pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Sedangkan menurut Ite dalam Suhendra (2006:77), pemberdayaan adalah meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu kegiatan meningkatkan kekuasaan kepada masyarakat yang kurang beruntung secara berkesinambungan, dinamis, serta berupaya untuk membangun daya itu untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran masyarakat agar ikut serta terlibat dalam mengelola semua potensi yang ada secara evolutif.

J. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, tepatnya dinyatakan dalam pasal 1, UMKM dapat dijelaskan secara terperinci berikut ini.

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

K. Pengertian Pemberdayaan UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan itu maka pemberdayaan UMKM sangatlah penting untuk dilaksanakan.

Dilihat dari pengertian pemberdayaan, maka pemberdayaan UMKM adalah upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UMKM itu sendiri. Jadi pendekatan pemberdayaan UMKM titik beratnya adalah penekanan pada pentingnya UMKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan UMKM yang

demikian diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi justru sebagai subyek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan UMKM secara umum.

Sebagaimana proses pemberdayaan masyarakat, proses pemberdayaan UMKM juga tidak jauh berbeda dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan UMKM sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat pelaku-pelaku UMKM agar dapat lebih pandai dan mampu mengembangkan komunikasi antar mereka sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika agen pengubah, baik yang berasal dari lembaga pemerintahan atau nonpemerintah telah menyelesaikan program pemberdayaan UMKM tersebut, pemberdayaan UMKM sebagai suatu proses dapat terus berlangsung.

Prinsip pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Serangkaian masalah/kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Modal

Menurut Drs. Moekijat (2000:63) dalam “Kamus Manajemen”, ada banyak perumusan yang berlainan mengenai modal, biasanya modal dianggap terdiri dari uang tunai, kredit, hak membuat dan menjual sesuatu (paten), mesin-mesin dan gedung-gedung. Akan tetapi sering istilah tersebut menyatakan hak milik total yang terdiri atas jumlah yang ditanam, surplus dan keuntungan-keuntungan yang dibagi.

Menurut Bambang Riyanto (1998:10), Dasar-dasar Pembelian Perusahaan: “Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa modal adalah sesuatu yang diberikan dan dialokasikan dan sangat dibutuhkan didalam sebuah usaha atau badan usaha untuk menjalankan apa yang diinginkan.

2. Sumber Daya Manusia

Mathis dan Jackson (2006:3), SDM adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Menurut Hasibuan (2003:224), pengertian Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku

dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.

3. Pemasaran

Menurut Kotler (2004:7), “pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang didalam individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.

Menurut Downey (2002:3), “pemasaran didefenisikan sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomi dari produsen melalui pedagang perantara sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, dan mempertukarkan tawaran yang bernialai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Sugiyono (2012:29), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Afrizal (2015:31), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yaitu kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia. Peneliti tidak berupaya untuk mengkuantifikasikan (menghitung) data yang telah dikumpulkan, melainkan menginterpretasikannya atau menangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang terjadi saat ini di dalamnya terdapat upaya menceritakan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai.

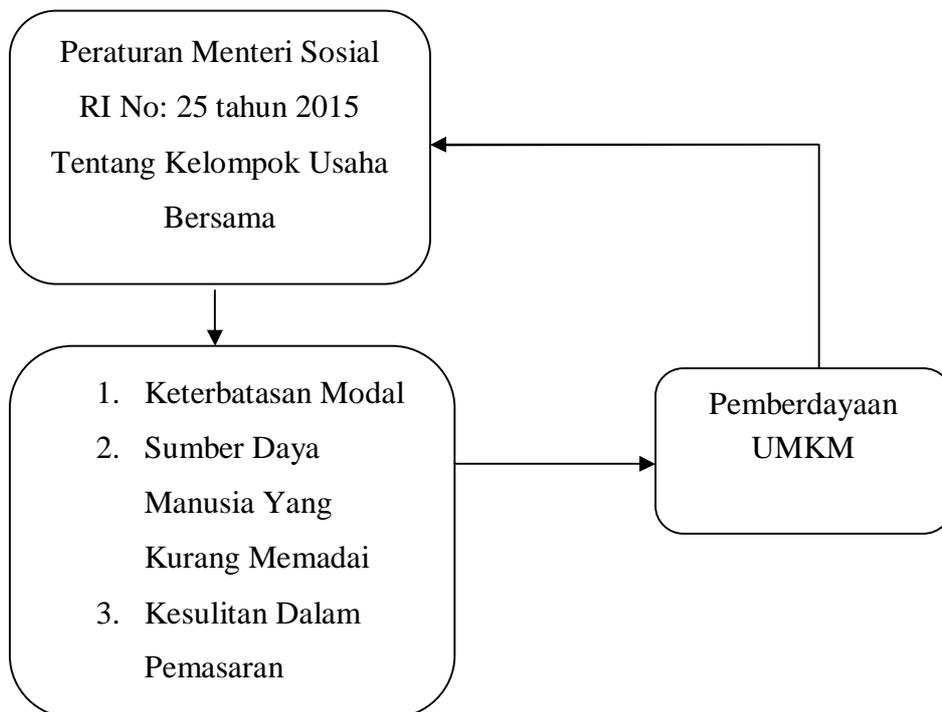
B. Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2010:66), menyebutkan bahwa kerangka berpikir dalam surat penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan

deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



C. Definisi Konsep

Menurut Nawawi (2005:12) mengemukakan konsep adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi dasar penelitian ilmu sosial. Jelasnya, definisi konsep adalah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat ditentukan kebenarannya dengan yang lain. Maka konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a. Modal adalah sesuatu yang diberikan dan dialokasikan dan sangat dibutuhkan didalam sebuah usaha atau badan usaha untuk menjalankan apa yang diinginkan.
- b. Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
- c. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengetahui suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Kategorisasi

No	Kategorisasi	Indikator
1	Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya anggaran 2. Biaya operasional 3. Biaya produk
2	Sumber daya manusia (sdm)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas anggota kube 2. Kuantitas (jumlah) 3. Keahlian anggota kube
3	Pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan operasional

		2. Sosialisasi belum maksimal 3. Fasilitas yang belum memadai
--	--	--

Adapun kriteria keberhasilan program KUBE dan Tingkat Keberhasilannya dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama di Kota Tanjungbalai) bahwa kriteria keberhasilan KUBE secara umum tercermin pada meningkatnya taraf kesejahteraan sosial yang ditandai oleh meningkatnya kemampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia (pangan, sandang dan papan) serta kesehatan dan pendidikan secara layak, meningkatnya dinamika sosial dan meningkatnya kemampuan dan keterampilan pemecahan masalah.

E. Informan

Menurut Moleong (2006:132), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian ini. Jadi, dia harus mempunyai banyak pengalaman latar penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- A) Nama : M. Idris, SH
 Jabatan/Pekerjaan : Kepala Dinas Sosial
 Umur : 36 tahun
 Pendidikan : S.1
- B) Nama : Nurlaili, Se
 Jabatan/Pekerjaan : Kasubag Umum, Perlngkapan Dan Kepegawaian
 Umur : 40 Tahun
 Pendidikan : S.1
- C) Nama : Evi Fitriani, ST
 Jabatan/Pekerjaan : Kasubag Program
 Umur : 32 Tahun
 Pendidikan : S.1

- D) Nama : Etty, SE
Jabatan/Pekerjaan : Kasubag Keuangan
Umur : 44 Tahun
Pendidikan : S.1
- E) Nama : Nur Aini
Jabatan/Pekerjaan : Pedagang
Umur : 46 Tahun
Pendidikan : SLTA

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:401), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan lain yang diperlukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan data primer yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang dilakukan dengan instrumen metode wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait atau mengajukan pertanyaan kepada orang yang berhubungan dengan obyek penelitian.
- 2) Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

- a) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.
- b) Studi kepeustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature seperti: buku, karya ilmiah, dan laporan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Afrizal (2015:176), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari mengumpulkan data sampai pada tahap penulisan laporan.

Teknik analisis yang digunakan data penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman. Mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

H. Lokasi dan Waktu Penelitian

a.lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai. Alasan penulis melakukan penelitian disini kerana Kota Tanjungbalai merupakan tempat tinggal penulis.

b.WaktuPenelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan selesai.

I. Deskripsi Lokasi Penelitian

a.SEJARAH SINGKAT DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003

tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya sesuai kebutuhan.

Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang sebelumnya adalah Kantor yang didirikan berdasarkan Keputusan Pemerintah Kota No. 44 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Dinas beserta lampiran-lampirannya sebagaimana beberapa kali dirubah, terakhir dengan Keputusan Pemerintah Kota No. 49 Tahun 1983.

Khusus di Indonesia Timur didirikan Departemen Sosial Daerah Sulawesi Selatan yang kemudian berubah menjadi Jawatan Sosial lalu dirubah lagi menjadi kantor Departemen Sosial berdasarkan keputusan Menteri Sosial RI No. 16 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Sosial di Propinsi maupun di kabupaten/Kotamadya. Dan akhirnya menjadi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai pada tanggal 10 April 2000 yang ditandai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungbalai, Nomor: 821.22:24.2000 tanggal 8 Maret 2000.

J. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

a. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana dan bagaimana suatu instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar dapat konsisten dan dapat eksis, antisifatif, inovatif dan produktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas yang terkandung dalam serangkaian tanggung jawab Dinas Sosial Kota Tanjungbalai sesuai dengan kesepakatan antara pimpinan dan pembantu pimpinan / staf, maka disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT KOTA TANJUNGBALAI”

Visi ini sejalan dengan misi ke 7 pembangunan jangka menengah kota Tanjungbalai mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang berdaya dan mandiri menuju kesejahteraan masyarakat.

b.Misi

Visi perlu diwujudkan dengan suatu tindakan nyata yang dinyatakan melalui misi. Misi akan membantu lebih jelas penggambaran visi yang akan dicapai serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh SKPD bersangkutan. Misi sangat penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi SKPD. Rumusan misi dalam dokumen Renstra SKPD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan pembangunan daerah dan sebaiknya pernyataan misi penggunaan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan. Berdasarkan uraian dan panduan di atas maka rumusan misi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial untuk menjamin pemenuhan dasar, pelayanan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS

2. Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan rehabilitasi sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan.
3. Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial, pembinaan semangat kejuangan, pelestarian nilai kepahlawanan dan kepeloporan
4. Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang mandiri dan sejahtera

c. Penjelasan Misi

Misi 1: Meningkatkan pemberdayaan sosial untuk menjamin pemenuhan dasar, pelayanan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri dalam memecahkan masalah kesejahteraan sosialnya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang dan pangan serta perumahan. Dimana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Misi 2 : Meningkatkan penyelenggaraan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan rehabilitasi sosial sebagai metode penanggulangan kemiskinan.

Dengan menyelenggarakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan rehabilitasi, diharapkan mampu mengatasi dan mengurangi jumlah kemiskinan di Kota tanjungbalai. Dengan adanya perlindungan sosial akan terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misi 3: Memelihara dan memperkuat stabilitas sosial, pembinaan semangat kejuangan, pelestarian nilai kepahlawanan dan kepeloporan.

Upaya yang diharapkan adalah tetap terpenuhinya nilai-nilai keteladanan dan jiwa kepahlawanan , serta meningkatnya semangat kejuangan. Disamping itu juga untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial dan ketahanan sosial masyarakat khususnya generasi muda dalam peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keberintisan dan kejuangan dan keteladanan, kepeloporan dengan ditandai dengan keterlibatannya dalam penanganan PMKS.

Misi 4: Meningkatkan kualitas masyarakat dan sumber daya manusia yang mandiri dan sejahtera.

Adapun tujuan pembangunan yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak dimasyarakat

K. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Perangkat Dinas Sosial

a.Uraian Tugas dan Fungsi

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang sosial berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Dinas;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

- c. Merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangan;
 - d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten / kota;
 - g. Melakukan pengendalian terhadap pelayanan umum;
 - h. Membina bawahan dalam pencapaian program Dinas;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan;
 - j. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugas dan fungsinya;
 - m. Pelaksanaan pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Daerah;
 - n. Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota sesuai standar yang ditetapkan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Dinas Sosial dibantu oleh :
- a. Sekretaris;
 - b. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;

- e. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unsur di lingkungan Dinas Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;
 - b. Mengkoordinasikan program kerja masing – masing bagian;
 - c. Mengkoordinasikan para Kepala Bagian;
 - d. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - e. Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala bagian dan bawahan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan para kepala bidang;
 - g. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan berdasar rencana kerja yang telah disusun;
 - h. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program dan keuangan;

- i. Menghimpun dan menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang sosial;
 - j. Mengumpulkan dan menyusun laporan sekretariat, bidang sebagaimana bahan laporan Dinas;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern;
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Dinas;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Sekretaris dibantu oleh :
- a. Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan Dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Program;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan.

Kepala Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha termasuk administrasi surat serta arsip;
- b. Melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, dan kerumahtanggaan;
- c. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- d. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- e. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);

- f. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- g. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- h. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- i. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- j. Menginventarisasikan barang-barang/perlengkapan asset pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LK);
- c. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- d. Penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya;

- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- b. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
- c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- d. Pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- (1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;

- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - f. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - c. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan integrasi sosial;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

- (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang rehabilitasi sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak diluar panti dan / atau lembaga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan / atau lembaga;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan / atau lembaga;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan / atau lembaga.
 - e. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi

- f. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
 - g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang rehabilitasi sosial di luar panti dan / atau lembaga;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Sehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - c. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum;

- d. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
- e. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik; dan
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual; dan
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan**Orang mempunyai tugas :**

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan / atau lembaga;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dn / atau lembaga
- c. Pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS (ODHA) untuk di koordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi; dan
- d. Pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk di koordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- e. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengebangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan / atau lembaga;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- g. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang.

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang Pemberdayaan Sosial .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi social;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan social;
 - e. Pelaksanaan norma, prosedur, dan criteria dibidang pemberdayaan sosial;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dibantu oleh :
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga;
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat;

- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan social
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Pelaksanakan kebijakan, pelaksanan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat / pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

- c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- b. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional kota;
- c. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan social
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

- (1) Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang penanganan fakir miskin mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau – pulau kecil dan perbatasan antar Negara
 - d. Pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kota;
 - e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penanganan fakir miskin; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, Kepala Bidang Penanganan fakir miskin dibantu oleh :
- a. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas;
 - b. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan;
 - c. Kepala Seksi Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan.

Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang;

Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kepala Seksi Bantuan Stimulasi dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;
- b. Pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
- d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Bidang

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kepala Dinas Sosial sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

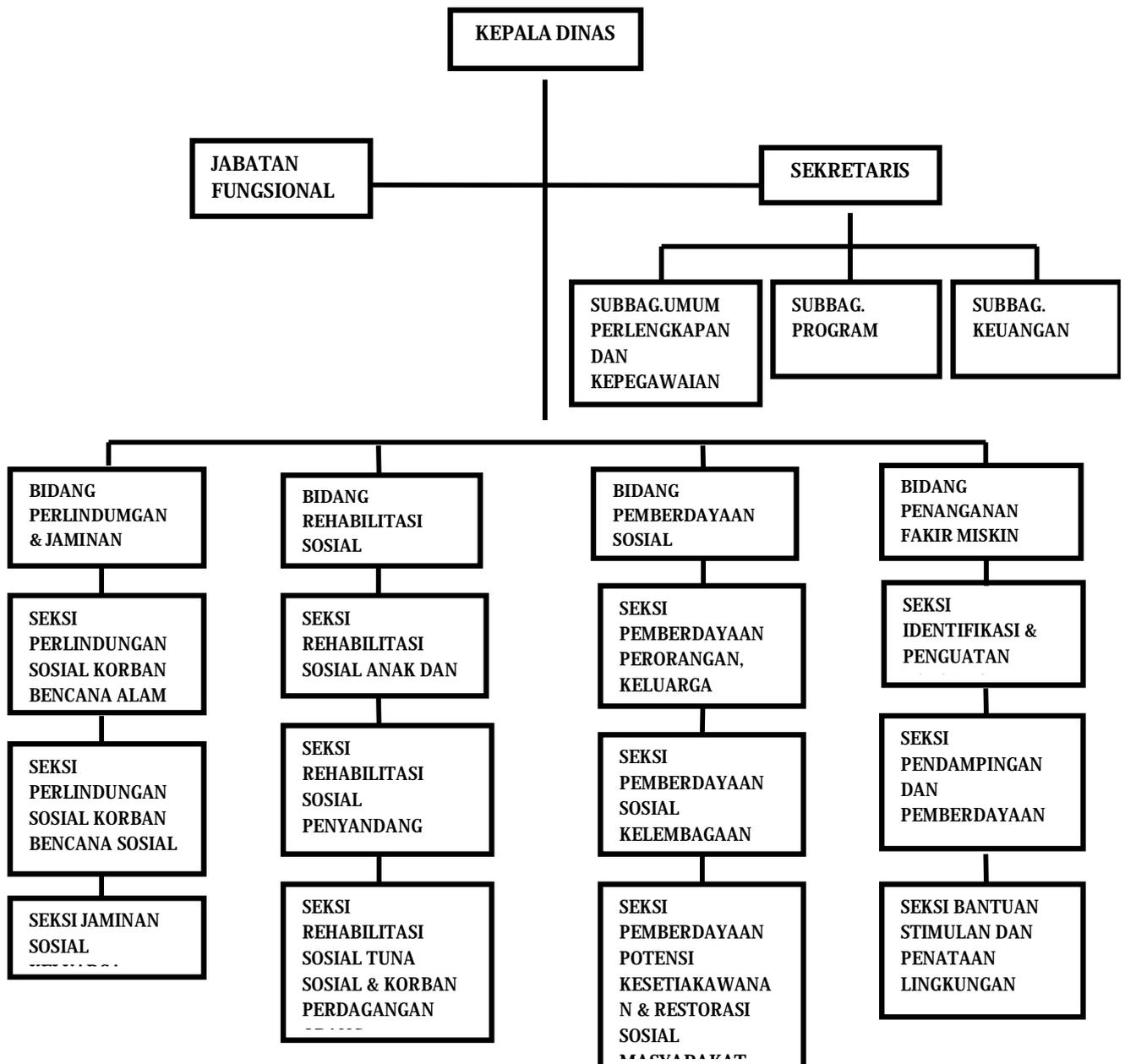
- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan sesuai dengan keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

L. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungbalai No. 34 Tahun 2016 struktur organisasi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai sebagai berikut:

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tanjungbalai



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi dari data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui metode-metode pengumpulan data yang telah disebutkan pada bab terdahulu. Demikian juga halnya permasalahan yang hendak dijawab dalam bab ini adalah bagaimana efektivitas pelaksanaan program KUBE dalam rangka pemberdayaan UMKM di Dinas Sosial kota Tanjungbalai.

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan secara mendalam, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data serta gambar dan berbagai hal yang ingin dijawab. Kedua, penulis melakukan wawancara dengan 5 orang informan penelitian yang terdiri dari 4 pegawai Dinas Sosial dan 1 orang masyarakat anggota KUBE kota Tanjungbalai.

Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Maret 2018 di kantor Dinas Sosial kota Tanjungbalai, wawancara dilakukan guna memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang peneliti tentukan serta untuk memperoleh data-data yang mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa pernyataan dari para informan mengenai permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari foto yang diambil pada lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih tiga minggu.

B. Hasil Penelitian

Wawancara adalah proses yang tanya jawab yang dilakukan seseorang kepada informan untuk dimintai keterangan atau informasi yang dibutuhkan untuk tujuan tertentu. Kedudukan informan adalah sumber informasi, sedangkan pewawancara adalah penggali informasi. Dalam prakteknya ada beberapa jenis wawancara yang dapat dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berikut ini adalah penyajian data-data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan informan penelitian. Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan di dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan, penulis mengamati keadaan dan situasi yang ada pada kantor Dinas Sosial kota Tanjungbalai.

Adapun daftar pertanyaan dalam wawancara ini disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian dan guna menjawab fenomena yang tengah terjadi. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

1. Modal

Modal adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan didalam sebuah kegiatan guna untuk menjalankan suatu usaha. Modal merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak M. Idris, SH selaku Kepala Dinas Sosial kota Tanjungbalai tentang anggaran/modal pelaksanaan program KUBE pada tahun 2016 dan diperoleh data sebagai berikut:

“Anggaran tahun 2016 modal untuk program KUBE yaitu 20 juta sesuai dengan hasil keputusan pemerintah dengan DPRD Kota. Dan menurut saya jumlah bantuan yang diberikan ini cukup besar. Karena ini dana bantuan ibaratnya dana mati bukan dana pinjaman sewaktu-waktu harus dikembalikan”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Bapak M. Idris, SH)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurlaili, SE selaku Kasubag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai mengatakan bahwa:

“Bantuan modal yang diberikan pemerintah diberikan langsung ke rekening masing-masing kelompok”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nurlaili, SE)

Lalu peneliti bertanya lagi dengan Ibu Evi Fitriani, ST selaku Kasubag Program pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan beliau mengatakan bahwa :

“Metode pencairan anggaran tersebut ya langsung ditransferkan ke rekening KUBE masing-masing. Akan tetapi pengambilan modal tersebut tetap diawasi oleh pendamping yang telah ditunjuk sebelumnya”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Evi Fitriani, ST)

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Evi Fitriani, ST menurut Ibu Etty, SE selaku Kasubag Keuangan pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai menyatakan bahwa:

“Untuk penyaluran modal program KUBE yaitu, misalnya sudah ada kelompok disetujui proposal bantuannya. Setelah itu pihak pemerintah daerah langsung mentransferkan sejumlah uang sesuai dengan besaran bantuan yang disepakati pada rapat anggaran pemerintah”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Etty, SE)

Dalam pelaksanaan program KUBE, masyarakat terlibat sebagai anggota didalamnya. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pandangan masyarakat mengenai anggaran/modal dalam pelaksanaan program KUBE di Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan peneliti mewawancarai Ibu Nur Aini selaku anggota KUBE dan beliau memberi pendapat mengenai bantuan modal dalam pelaksanaan program KUBE yaitu:

“Ya Alhamdulillah, untuk bantuan yang diterima kemarin sekitar 20 juta. Ya walaupun itu harus diteruskan dalam bentuk barang itupun bagi kami dana sebesar itu tergolong kecil, karena yang menjadi anggota KUBE itu rata-rata orang yang tergolong kurang mampu. Makanya saya bilang cukup kurang itu bantuan”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nur Aini)

Sesuai hasil wawancara dengan beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa jumlah modal yang dialokasikan oleh pemerintah untuk setiap Kelompok KUBE sebesar Rp.20.000.000,00 pada tahun 2016.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki SDM sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan SDM yang tergolong kurang mampu.

Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang bisa mendapatkan bantuan modal untuk usaha ini hanya yang memenuhi persyaratan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak M. Idris, SH selaku Kepala Dinas Sosial kota Tanjungbalai mengenai SDM dalam pelaksanaan program KUBE yaitu:

“Untuk mengenai SDM program KUBE dalam setaip 1 kelompok berjumlah 10 orang dan masing-masing kelompok diketuai oleh satu orang saja”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Bapak M. Idris, SH)

Lalu peneliti mewawancarai Ibu Nurlaili, SE selaku Kasubag Umum, Perlengkapan dan kepegawaian pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan beliau mengatakan bahwa:

“Dapat dilihat dari proses penyeleksian SDM untuk program sampai pada tahap peninjauan oleh tim, program ini sudah tepat sasaran, karena syarat yang diberikan itu sudah ketat dan sesuai dengan prosedur yang ada”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nurlaili, SE)

Berbeda dengan jawaban Ibu Evi Fitriani, ST selaku Kasubag Program pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai mengatakan bahwa:

“Untuk perekrutan SDM program KUBE dilihat dari keahlian dan keterampilan orang tersebut supaya mengembangkan usaha yang akan dilaksanakan dalam program KUBE”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Evi Fitriani, ST)

Kemudian peneliti bertanya kepada Ibu Etty, SE selaku Kasubag keuangan pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan beliau mengatakan bahwa:

“Untuk melihat kualitas anggota KUBE bisa dilihat dari keahlian anggota masing-masing dalam mengembangkan keterampilannya”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Etty, SE)

Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat yang bernama Ibu Nur Aini mengatakan bahwa:

“Dari 10 anggota KUBE, itu semua dari masyarakat kurang mampu dan mempunyai keterampilan dan keahlian dalam berbagai jenis kerajinan”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nur Aini)

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber diatas, penulis bisa mengatakan bahwa tujuan untuk perekrutan SDM dalam pelaksanaan program KUBE yaitu untuk memberikan kualitas yang baik dalam pelaksanaan program KUBE dan mengembangkan keahlian yang dimiliki masing-masing anggota KUBE.

3. Pemasaran

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan tujuan dari pelaksanaan suatu program. Komunikasi yang terjalin baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksanaan program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program KUBE. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses pemasaran maupun dengan kata lain sosialisasi.

Pemasaran menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Dengan begitu masyarakat akan semakin terdorong untuk mengakses informasi lebih jauh mengenai program KUBE tersebut serta ambil bagian dalam program yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut.

Terkait proses pemasaran program KUBE yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Tanjungbalai, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Idris, SH selaku Kepala Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan beliau mengatakan bahwa:

“Ini juga yang menjadi kekurangan dari program ini, dalam artian kami sudah melakukan sosialisasi akan tetapi dalam setahun itu cuma satu kali. Hal ini dikarenakan keterbatasan biaya untuk melakukan hal itu. Jadi yang kami harapkan bahwa masyarakat yang lebih proaktif dalam mencari informasi”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Bapak M. Idris, SH)

Senada dengan yang dikatakan Bapak M. Idris, SH menurut Ibu Nurlaili, SE selaku Kasubag Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai dan beliau mengatakan bahwa:

“Pemasaran yang dilakukan itu hanya sekali, karena kami menganggap bahwa program ini sudah banyak diketahui oleh masyarakat dan juga melalui pemerintah ditingkat kelurahan juga dihimbau untuk menginformasikan kepada masyarakatnya terkait program ini”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nurlaili, SE)

Lalu peneliti mewawancarai Ibu Evi Fitriani, ST selaku Kasubag Program pada

Dinas Sosial kota Tanjungbalai tentang proses pemasaran yaitu:

“Pemasaran yang dilakukan hanya kepada masyarakat yang minat untuk mengikuti pelaksanaan program KUBE jadi, masyarakat yang dari awal tidak meminati program KUBE tidak mendapatkan informasi mengenai program tersebut”.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Evi Fitriani, ST)

Kemudian peneliti mewawancarai Ibu Ety, SE selaku Kasubag Keuangan

pada Dinas Sosial kota Tanjungbalai menyatakan bahwa :

“Sosialisasi yang kurang maksimal dikarenakan fasilitas yang kurang memadai untuk terlaksananya kegiatan pemasaran tersebut”

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Ety, SE)

Untuk mencari informasi yang lebih akurat, penulis kemudian mewawancarai salah satu dari masyarakat dengan Ibu Nur Aini:

“Kami tau informasi program itu dari masyarakat informasi yang disampaikan dari mulut ke mulut. Itu pun informasi ini berputar dalam kalangan tertntu saja karenaa tidak sampai menyeluruh informasinya. Yah yang diharapkan kedepannya bagaimana ini sosialisasi bisa menyentuh semua masyarakat.

(Hasil wawancara pada Rabu 13 Maret 2018 dengan Ibu Nur Aini)

Dalam melakukan proses pemasaran untuk pelaksanaan program KUBE dapat terlihat jelas dari terkait cara yang digunakan pihak pelaksanaan program dalam memasarkan program KUBE, penulis merasa masih minim, karena disampaikan melalui forum-forum pertemuan pihak-pihak tertentu saja, itupun informasi akan bantuan ini lebih banyak tersebar dari mulut kemulut.

C. Pembahasan

Dalam pelaksanaan suatu program, masalah anggaran tertentu merupakan salah satu hal mendasar yang menentukan keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Tanpa adanya sumber pendanaan dan penganggaran yang baik, pelaksanaan suatu program akan mengalami hambatan serta tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, salah satu aspek pendukung dalam keberhasilan pelaksanaan program-program pemerintah yang dijalankan selama ini adalah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program-program yang bersangkutan.

Demikian halnya dengan program KUBE yang faktor keberhasilannya juga sangat ditentukan oleh beberapa aspek, salah satunya adalah masalah pendanaan/anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk pelaksanaan program ini. Sesuai dengan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa adapun jumlah anggran yang dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2016 dalam hal pendanaan program KUBE berkisar 20 juta satiap kelompok.

Bila penyaluran bantuan modal usaha kepada masyarakat sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dengan prosedur yang berlaku, maka pencapaian tujuan yang diharapkan melalui program KUBE ini akan dengan mudah dicapai. Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan dari program KUBE adalah membantu masyarakat yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan kesempatan berusaha sehingga dengan begitu, mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya serta memperbaiki kondisi ekonomi mereka ke arah yang lebih baik.

Adapun mengenai bentuk bantuan modal usaha yang disalurkan oleh pihak pemerintah kepada kelompok-kelompok KUBE berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian, diketahui bahwa bentuk bantuan modal yang diberikan oleh Dinas Sosial kota Tanjungbalai berbeda dari bantuan modal yang diberikan oleh dinas-dinas sosial di daerah lain. Jika daerah lain diberikan bantuan berupa penyediaan barang/peralatan yang disesuaikan dengan jenis usaha dan keahlian dari kelompok-kelompok KUBE, maka di kota Tanjungbalai sendiri memberikan bantuan berupa uang sebesar 20 juta per kelompok yang akan ditransferkan ke rekening masing-masing KUBE.

Adapun mekanisme secara jelas mengenai penyaluran bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok KUBE sesuai dengan aturan yang ada adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan proposal ke Dinas Sosial kota Tanjungbalai untuk mendapatkan bantuan program.
2. Dinas Sosial melakukan peninjauan ke lapangan.

3. Proposal yang masuk kemudian diseleksi kelayakannya untuk menerima bantuan.
4. Setelah dinyatakan lolos seleksi, kemudian Dinas Sosial Kota Tanjungbalai melakukan peninjauan ulang terkait kelayakan calon penerima bantuan untuk diberikan bantuan melalui program KUBE.
5. Dana yang sudah dikucurkan langsung oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial kota Tanjungbalai ke rekening masing-masing kelompok KUBE.
6. Petugas pendamping bersama dengan pengurus kelompok (Ketua, Sekretaris dan Bendahara kelompok) melakukan pengambilan dana di Bank.
7. Setelah pengambilan dana dilakukan, petugas pendamping membantu dalam penyediaan barang/peralatan usaha.
8. Setelah proses pembelian barang selesai dilakukan, maka baik KUBE maupun petugas pendamping harus membuat laporan pertanggung jawaban terkait pencairan dana di Bank atau serah terima pembelian barang/peralatan usaha yang akan disampaikan ke Dinas Sosial.

Di kota Tanjungbalai berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Sosial kota Tanjungbalai No.460/241/DINSOS/IV/2016 tentang nama dan lokasi penerima bantuan kelompok Usaha Bersama di kota Tanjungbalai tahun anggaran 2016 terdapat beberapa jenis usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat yang berpartisipasi dalam Kelompok Usaha Bersama diantaranya usaha warung, penjual kue tradisional, penjahitan, jual barang campuran, dan sebagainya.

Akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis melalui wawancara bahwa pada mekanisme yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial kota Tanjungbalai tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dalam pemberian bantuan yang diberikan oleh pemerintah kota Tanjungbalai melalui Dinas Sosial kota Tanjungbalai, Dinas Sosial memiliki TKSK yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan terhadap semua kegiatan Dinas Sosial disetiap kecamatan tanpa terkecuali pendamping program KUBE. Tim ini juga bertugas untuk mengawasi jalannya usaha yang dilakukan oleh KUBE dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Sosial kota Tanjungbalai yaitu melakukan sidak dalam waktu yang tidak ditentukan. Adapun bentuk pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial itu melalui pendamping TKSK adalah sesekali meninjau pelaksanaan dilokasi KUBE.

Sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah, hendaknya memiliki sasaran yang tepat karena ketepatan sasaran dalam setiap pelaksanaan program menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap suau keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Sasaran dari seiap program hendaknya benar-benar disesuaikan dengan realita yang ada di masyarakat. Demikian juga halnya dengan program-program yang khusus dibuat oleh pemerintah sebagai pemberdayaan masyarakat yang tergolong kurang mampu. Program pemberdayaan seperti program KUBE seharusnya diberikan hanya kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan melalui program ini. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah yang bisa mendapatkan bantuan dana untuk usaha ini hanya yang memenuhi persyaratan.

Hal ini terlihat ketika penulis menelusuri proses pelaksanaan program ini sampai mengunjungi beberapa penerima bantuan KUBE di lapangan. Melalui proses seleksi yang begitu ketat oleh tim yang ditunjuk oleh pihak dinas sosial sehingga akhirnya dapat menentukan penerima bantuan adalah yang berasal dari kategori keluarga miskin yang memiliki kesamaan tujuan atau keterampilan untuk bersama-sama membentuk sebuah kelompok usaha yang akan diberikan bantuan modal usaha dari pemerintah. Hal ini juga tidak terlepas dari kerjasama pemerintah di tingkat kelurahan yang kemudian memperhatikan warganya yang termasuk kategori miskin sekaligus memberikan arahan atau bantuan untuk pengajuan proposal bantuan KUBE bagi warganya yang memenuhi kriteria sampai mendapatkan bantuan tersebut.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program. Demikian halnya dengan program KUBE pada Dinas Sosial Kota Tanjungbalai yang tentunya akan terlaksana secara efektif apabila komunikasi antara pihak-pihak yang terkait berjalan dengan baik.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara pihak Dinas Sosial selaku pelaksana program dengan masyarakat selaku sasaran utama dari program KUBE menjadi hal yang mutlak diperlukan demi tercapainya keefektifan pelaksanaan program KUBE ini. Bentuk komunikasi disini tentunya dapat diinterpretasikan melalui proses sosialisasi program kepada masyarakat yang merupakan sasaran dari program yang bersangkutan.

Sosialisasi menjadi kunci utama keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diharapkan. Melalui proses sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, suatu program akan dengan mudah mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Hal ini dapat terjadi karena semakin baik proses sosialisasi dari suatu program maka akan semakin baik pula pemahaman masyarakat akan konsep dan tujuan dari program tersebut.

Dengan melihat kondisi di lapangan terkait cara yang digunakan oleh pihak pelaksana program dalam mensosialisasikan program KUBE, penulis merasa masih minim, karena hanya disampaikan melalui forum-forum pertemuan pihak-pihak tertentu saja, itupun informasi akan bantuan ini lebih banyak tersebar dari mulut ke mulut. Pihak dinas sosial masih tergolong jarang melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, ataupun memasang spanduk-spanduk terkait program KUBE. Hal ini diakui oleh pihak Dinas Sosial disebabkan oleh adanya keterbatasan dana untuk membiayai proses sosialisasi tersebut.

Media komunikasi yang cukup sederhana ini menghambat kelancaran penyampaian informasi kepada masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada sulitnya masyarakat untuk mengakses program ini. Selain itu, masih kurangnya respon masyarakat terhadap program ini lebih dikarenakan belum adanya pemahaman yang memadai tentang konsep program KUBE yang diberikan oleh dinas sosial kepada masyarakat.

Hal ini terjadi karena proses sosialisasi program yang dilakukan oleh Dinas Sosial masih tergolong sangat minim. Sebelum program ini terlaksana, pihak Dinas Sosial memang sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait

program ini namun tidak cukup sering sehingga masih banyak masyarakat yang sebenarnya membutuhkan program ini, menjadi tidak mendapatkan informasi dan akses yang baik untuk ambil bagian dalam program ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam hal ini dinas sosial agar lebih bisa menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat miskin selaku sasaran dari program KUBE.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan menyimpulkan uraian-uraian tersebut di bawah ini :

1. Pada proses pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Rangka Pemberdayaan di Dinas Sosial Kota Tanjungbalai, kurang efektifnya pelaksanaan sosialisasi Program pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama. Hal tersebut terindikasi oleh informasi yang disampaikan oleh petugas pelaksana dan dari segi data yang di dapatkan, justru belum menyebar ke semua masyarakat miskin yang tergolong dalam KUBE, dengan demikian pelaksanaan program KUBE ini belum semuanya efektif.
2. Struktur pada proses pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama dalam Rangka Pemberdayaan UMKM menurut warga miskin yang tergolong dalam Kelompok Usaha Bersama, menurut mereka pada mekanisme/prosedur penyaluran dana serta administrasi yang masih birokratis dan banyak melibatkan instansi terkait sehingga dalam proses diperlukan waktu relatif sedikit lama, serta kurang menunjukkan kesederhanaan, sehingga untuk proses mencairkan dana mempengaruhi waktu yang cukup lama.

3. Pada proses program Kelompok Usaha Bersama dalam rangka Pemberdayaan UMKM di Dinas Sosial kota Tanjungbalai, tidak terlepas dari peran berbagai pihak dan secara institusional. Keterlibatan tersebut tidak terlepas dari Dinas Sosial kota Tanjungbalai yang berketepatan terhadap pelaksanaan Program KUBE dalam rangka pemberdayaan UMKM. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya adalah peran petugas pendamping, seiring dengan pelaksanaan program KUBE ini, ternyata keberadaan Pendamping sangat penting, bukan hanya sebagai pengarah, pengatur dan pengendali tetapi juga bertindak sebagai fasilitator, dengan menunjukkan adanya keselarasan antara acuan kerja dengan pelaksanaan dilapangan sudah cukup baik.
4. Pada proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama dalam rangka Pemberdayaan UMKM di Dinas Sosial kota Tanjungbalai untuk efektivitas pada kelompok sasaran sudah sesuai sasaran, terutama terhadap penyaluran dana kepada kelompok sasaran sesuai dengan besarnya bantuan yang ditentukan pada program atau diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kemudian dari segi besarnya bantuan dana juga sudah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar RP. 20.000.000. Sedangkan dari segi ketepatan waktu pencairan dana yang masih sedikit problem dengan ketidak sesuaiannya jadwal yang telah ditentukan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program kelompok usaha bersama (KUBE) dalam rangka pemberdayaan UMKM di Dinas Sosial kota Tanjungbalai. Maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah menyediakan anggaran yang lebih dari yang telah diperuntukkan bagi penerima bantuan KUBE di Kota Makassar, karena bantuan yang diberikan merupakan modal awal dari setiap KUBE untuk memulai usaha dan merintis usahanya hingga tumbuh, berkembang, dan maju. Selain itu jumlah anggota yang mencapai 10 orang per kelompok jelas sangat dibutuhkan dana yang lebih, karena penerima adalah keluarga miskin maka yang menjadi kekhawatiran adalah kalau modal kecil maka perputaran juga kecil sementara ada banyak keluarga yang akan hidup melalui KUBE tersebut. Olehnya itu dana untuk setiap KUBE dapat lebih besar karena mereka hanya menerima bantuan sekali dan dana tersebut tidak bergulir.
2. Sebaiknya proses penyuluhan keterampilan tidak sekedar formalitas untuk pelaksanaan program setiap tahunnya karena jelas bahwa penerima bantuan KUBE membutuhkan penyuluhan keterampilan berusaha sebagai salah satu bekal bagi upaya mereka membangun usahanya.
3. Penting rasanya agar dibuat tim pendamping khusus untuk setiap KUBE yang terbentuk di tingkat kelurahan, karena proses pendampingan harus dilakukan secara intens sebelum KUBE tersebut dapat dikategorikan dalam tahap berkembang. Karena setiap anggota KUBE tersebut adalah

fakir miskin yang lebih banyak berpikir apa yang di makan hari ini ketimbang berpikir jauh kedepan.

4. Pemerintah Kota Tangjungbalai dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar jika ingin melanjutkan pelaksanaan program di tahun-tahun berikutnya perlu serius dalam pengawalannya dalam artian segala hal yang dinilai tidak efektif perlu ditindaklanjuti seperti proses pendampingan, penyuluhan keterampilan berusaha, serta jumlah bantuan dana yang lebih besar. Jikalau hal itu tidak dapat dipenuhi maka lebih program ini dihentikan saja daripada berjalanan setiap tahun tapi hanya menghabiskan anggaran karena sangat tidak efektif dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Campbell. 1989. *Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora*. Jakarta: Erlangga.
- David, Downey. 2002. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: Erlangga.
- Gie, The Liang. 2007. *Administrasi Perkantoran (edisi ke-4)*. Jakarta: Liberty.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kotler. 2004. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Jakarta: Rineka cipta
- Mathis, Robert L. dan Jhon H Jackson. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Moekijat. 2000. *Kamus Manajemen*. Bandung: Madar Maju
- Moleong, Lexy.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Karya
- Nawawi, Hadari.2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT.Remaja Karya
- Riyanto, Bambang. 1998. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan (Edisi ke-4)*. Yogyakarta: BPFE.
- Siagian, P. Sondang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi (Terjemahan)*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Suhendra. 2006. *Pemberdayaan*. Yogyakarta: Andi.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Cintra Utama.

Sutrisno, Edy. 2011. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Tambunan, T. H. Tulus. 2009. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Tayibnapi, Farida, Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Umar, Husein. 2002. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia.

Sumber-sumber lain:

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-19/pb/2005 tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha Bagi Keluarga Binaan Sosial Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 25 tahun 2005 tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/JURNAL_NOVI.pdf.

http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/Ejurnal-evvy.pdf.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK KANTOR DINAS

SOSIAL KOTA TANJUNGBALAI

A. Modal

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi keterbatasan modal dalam pelaksanaan program KUBE?
2. Apakah ada peningkatan modal yang didapatkan dari pelaksanaan program KUBE?
3. Apakah penggunaan modal dalam pelaksanaan program KUBE sudah terealisasi dengan baik?

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu kualitas dan kuantitas SDM program KUBE?
2. Bagaimana Bapak/Ibu merekrut SDM yang baik untuk program KUBE ?
3. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk meningkatkan SDM dalam program KUBE?

C. Pemasaran

1. Hambatan apa yang ditemui dalam melakukan pemasaran untuk pelaksanaan program KUBE?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran dalam mendukung pelaksanaan program KUBE?
3. Bagaimana Bapak/Ibu memberikan pemasaran yang baik kepada anggota KUBE?

**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT
ANGGOTA KUBE**

A. Modal

1. Berapa besar modal untuk pelaksanaan program KUBE yang Ibu terima?
2. Apakah modal tersebut Ibu gunakan dengan baik untuk pelaksanaan program KUBE?
3. Kemana saja modal yang diberikan ke kelompok KUBE masing-masing?

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Bagaimana menurut Ibu kualitas dan kuantitas SDM pelaksanaan program KUBE?
2. Upaya-upaya apa saja yang ditempuh untuk meningkatkan SDM dalam anggota KUBE?
3. Siapa yang lebih berperan dalam merekrut tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang bisa untuk dikembangkan?

C. Pemasaran

1. Hambatan apa yang ditemui dalam melakukan pemasaran bidang usaha dalam program KUBE?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemasaran usaha-usaha yang dibuat dalam mendukung pelaksanaan program KUBE?
3. Bagaimana Ibu memberikan pemasaran yang baik kepada anggota KUBE?